



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IKA HERMINI NOVIANTI
- Jabatan** : KEPALA SUBDIREKTORAT TARIF, REMUNERASI, DAN INFORMASI BADAN LAYANAN UMUM
- NHK** : 403114

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.888.260.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 18236 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 638.260.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **551.400.000**

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
- MOTOR, KAWASAKI VERSYS 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
- MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
- MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, SUBARU FORESTER XT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- MOBIL, TOYOTA AGYA/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 146.400.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	740.415.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	366.102.522
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.561.177.522
III. HUTANG	Rp.	291.624.463
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.269.553.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.